

RINGKASAN

**Amira Addina Zahra
190510084**

**PENUNDAAN PELAKSANAAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN
MASJID TAQWA MUHAMMADIYAH
SAMALANGA**

**(Dr. Yusrizal, S.H., M.H., dan Muhibuddin, S.H.,
M.Hum.)**

Rumah ibadah merupakan sarana yang digunakan oleh umat beragama dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, negara tentu menjamin hak warga negara untuk mendirikan rumah ibadah meskipun pendiriannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2006 dan Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016 tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah. Pada tahun 2015 hingga 2019 terjadi penolakan terhadap pendirian Masjid Taqwa Muhammadiyah hingga kemudian terjadi berbagai polemik di tengah masyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam pembuatan skripsi adalah bagaimana prosedur pemberian izin mendirikan bangunan bagi masjid sebagai rumah ibadah dan upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bireuen untuk mengantisipasi terjadinya penolakan terhadap Izin Mendirikan Bangunan kepada panitia pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prosedur pemberian Izin Mendirikan Bangunan bagi masjid sebagai rumah ibadah, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk mengantisipasi terjadinya penolakan terhadap Izin Mendirikan Bangunan yang telah diberikan kepada Panitia Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu merupakan Metode yuridis sosiologis melalui pendekatan kasus dengan menggunakan metode kepustakaan serta wawancara. Metode penelitian dengan menggunakan Metode Yuridis Sosiologis bersifat deskriptif yang akan menggambarkan objek tertentu secara sistematis, secara faktual, dan cermat.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian IMB kepada panitia pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga mengalami penundaan yang diakibatkan oleh konflik yang timbul karena adanya pembangunan masjid yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur Izin Mendirikan Bangunan.

Pada skripsi ini yang akan menjadi kesimpulan yaitu Masjid Taqwa Muhammadiyah yang mendapatkan kebijakan dalam bentuk keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada Panitia Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga yang pada dasarnya panitia pembangunan tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan sehingga terjadi pemberontakan oleh masyarakat

setempat yang kontra akan pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga, dan Pemerintah Kabupaten Bireuen beserta seluruh jajarannya segera mengambil tindakan untuk mengeluarkan keputusan penundaan pelaksanaan pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga.

Kata Kunci : Izin Mendirikan Bangunan, Penundaan Pelaksanaan, Rumah Ibadah.

SUMMARY

Amira Addina Zahra
190510084

**POSTPONEMENT OF THE IMPLEMENTATION
OF THE BUILDING PERMIT FOR THE
CONSTRUCTION OF THE TAQWA MOSQUE
MUHAMMADIYAH SAMALANGA
(Dr. Yusrizal, S.H., M.H., and Muhibuddin, S.H.,
M.Hum.)**

Houses of worship are facilities used by religious people in carrying out worship in accordance with their beliefs, the state certainly guarantees the rights of citizens to establish houses of worship even though their establishment must be in accordance with applicable laws and regulations, such as the Joint Regulation of the Minister of Religion and the Minister of Home Affairs No. 8 of 2006 and Aceh Qanun No. 4 of 2016 concerning guidelines for maintaining religious harmony and establishing places of worship. In 2015 to 2019 there was a rejection of the establishment of the Taqwa Mosque Muhammadiyah until then there were various polemics in the community. Based on the description above, the formulation of the problem in making this thesis is how the procedure for granting a building permit for a mosque as a house of worship and the efforts made by the Bireuen Regency government to anticipate the rejection of the Building Permit to the Taqwa Muhammadiyah Samalanga Mosque construction committee.

The purpose of this study was conducted to determine the procedure for granting a Building Permit for a mosque as a house of worship, and to find out the efforts made by the Bireuen Regency Government to anticipate the rejection of the Building Permit that has been given to the Taqwa Muhammadiyah Samalanga Mosque Development Committee.

The method used in this research is a sociological juridical method through a case approach using library methods and interviews. The research method using the Juridical Sociological Method is descriptive in nature which will describe the object systematically, factually, and carefully.

From the results of this study indicate that the granting of IMB to the construction committee of the Taqwa Mosque Muhammadiyah Samalanga experienced delays caused by conflicts that arose due to the construction of a mosque that was carried out not in accordance with the Building Permit procedure.

In this thesis, the conclusion will be that the Taqwa Muhammadiyah Mosque which received a policy in the form of a decision of the Head of the Investment, Trade, Cooperatives and SMEs Office of Bireuen Regency Number 63 of 2017 concerning the Granting of a Building Permit to the Taqwa Muhammadiyah Samalanga Mosque Development Committee, which basically the development committee did not meet the requirements for obtaining a Building Permit so that there was a rebellion by the local community who opposed the construction of the Taqwa Muhammadiyah Samalanga Mosque, and the Bireuen Regency Government and all its staff immediately took action to issue a decision to delay the implementation of the construction of the Taqwa Muhammadiyah Samalanga Mosque.

Keywords: Building Construction Permit, Postponement of Implementation, House of Worship.